CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

WSIS PRIZES 2018 CHAMPION

CASE STUDY SERIES# 16

IMPLEMENTASI KERANGKA LITERASI DIGITAL

DI AUSTRALIA, KANADA, ITALIA, JEPANG, DAN MEKSIKO

Penulis
Habibah Hermanadi
Fahreza Daniswara
Penyunting
Dirgayuza Setiawan, M.Sc
Viyasa Rahyaputra
Desainer & Penyusun Tata Letak:
Galih Kartika

Ringkasan

Sejak diperkenalkan pada akhir abad ke-19, internet telah muncul sebagai komponen vital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan internet yang cepat tidak disertai oleh peningkatan perilaku pengguna dan pemahaman atas fungsi internet. Dalam banyak kasus, perilaku negatif seperti *cyberbullying* dan ujaran kebencian biasanya ditemukan di internet. Oleh karena itu, literasi digital di kalangan pengguna internet perlu ditingkatkan dan diinternalisasi dalam setiap lini kehidupan. Studi kasus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep literasi digital dengan melihat perkembangannya dalam dekade terakhir. Studi kasus ini akan dijabarkan lebih lanjut melalui studi perbandingan terhadap praktik program literasi digital oleh negara-negara G-20, dan ditulis dengan menggunakan metode penelitian studi literatur. Tulisan ini mencoba untuk menelaah praktik terbaik dan pengalaman program peningkatan literasi digital di lima negara G-20, yaitu Australia, Kanada, Jepang, Italia, dan Meksiko. Kemudian, data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan di lima negara dianalisis persamaan dan perbedaan program literasi digitalnya. Setelah itu, sebuah refleksi kritis dari keseluruhan program dan pemahaman literasi digitalnya diambil untuk dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia. Berdasarkan studi banding dari lima negara G-20, ditemukan bahwa pola program peningkatan literasi digital dapat diidentifikasi dalam tiga poin; yaitu adanya program literasi digital skala nasional, inisiatif dari masyarakat sipil, dan penekanan pada pendidikan.

Literasi Digital: Sebuah Pengantar

Pertumbuhan jumlah pemakai internet terus meningkat sepanjang tahun. Lebih banyak pengguna berarti lebih banyak pertukaran informasi terjadi di dunia digital. Menurut gambar 1 di bawah ini, lalu lintas internet global akan mencapai hampir 200 exabyte per bulan pada tahun 2020. Ini berarti terdapat peningkatan ketergantungan pada komunikasi dan kemajuan pesat dari konektivitas berkualitas tinggi.[i]

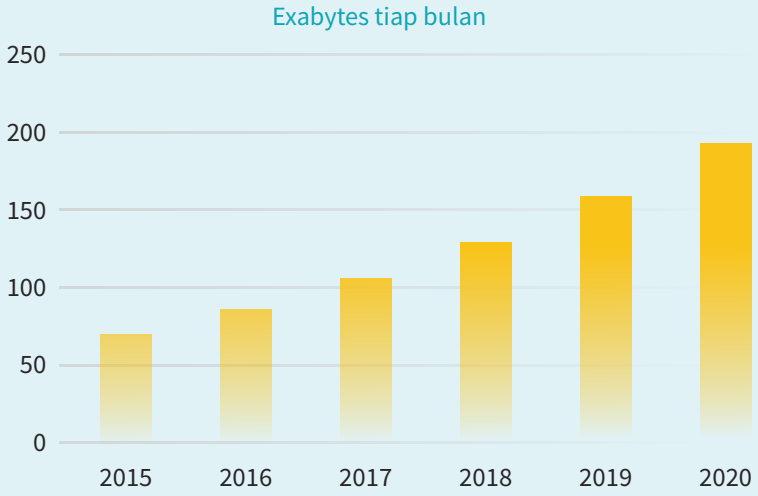

Gambar 1. Perkiraan Penggunaan Internet Global

Melalui peningkatan konektivitas ini, muncul juga potensi masalah atau ancaman. Beberapa di antaranya mencakup berita bohong, gerakan anti-intelijen, radikalisme online, jaringan teroris, konten berbahaya, perundungan, dan masih banyak lagi. Masalah ini muncul karena pertumbuhan ini diiringi dengan kerangka pendidikan literasi digital yang penting bagi pengguna internet.[ii]

Literasi digital telah ada sejak tahun 1990-an, namun baru sekarang dunia sangat gencar menerapkannya di tingkat nasional. Dulu, keterampilan digital yang

dibutuhkan seorang karyawan sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Seiring berjalannya waktu, literasi digital menjadi sebuah konsep yang mencakup lebih dari sekedar aspek fungsional dari penggunaan teknologi. Menurut Selfe, literasi digital mengacu pada kumpulan nilai-nilai sosial dan budaya yang rumit yang terkait dengan etika, praktik, dan keterampilan yang ada dan terlibat dalam pengoperasian bahasa dalam konteks lingkungan elektronik, termasuk kemampuan untuk membaca dan berkomunikasi dalam dunia digital.[iii] Di luar konteks praktik literasi digital, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memprioritaskan literasi digital sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital harus mampu mencakup kemampuan untuk mengenali informasi yang dibutuhkan, mencari dan mengevaluasi informasi yang berkualitas, menyimpan dan mengambil informasi, menggunakan informasi secara etis dan efisien, dan menerapkan informasi untuk menciptakan dan mengkomunikasikan pengetahuan.[iv]

Singkatnya, literasi digital menyediakan kerangka bagi pengguna untuk berselancar di dunia digital yang terus berkembang. Hal ini menjadi relevan karena tantangan yang datang yang dibawa oleh kemajuan teknologi semakin besar. Tantangan tersebut mencakup kesenjangan digital, radikalisasi daring, ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan banyak lagi. Masalah-masalah ini merugikan masyarakat, dan telah dikategorikan sebagai ancaman keamanan di era digital oleh banyak ahli. Banyak negara telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, dan dalam studi kasus ini, ada lima negara dengan program literasi digital yang ditelaah lebih lanjut, yaitu Jepang, Australia, Kanada, Italia, dan Meksiko.

Komitmen Global Mewujudkan Masyarakat dengan Literasi Digital

Dalam pendahuluan, kita melihat bagaimana UNESCO telah menunjukkan pentingnya literasi digital sebagai keterampilan hidup yang penting, selain untuk bekerja. Irina Bokova, Sekretaris Jenderal UNESCO saat ini, melihat betapa pentingnya literasi digital bagi generasi muda terutama dalam memerangi konten berbahaya dan radikalisasi yang menyebar di internet. Dengan demikian, literasi digital akan memberikan arahan dan keterampilan bertahan hidup yang dibutuhkan untuk menghindari bahaya, serta kemampuan untuk mencerna informasi secara kritis, membedakan kebohongan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan dan rasa hormat di antara sesama manusia.[v]

G20 Insight, sebuah lembaga berbasis G20 yang didukung oleh berbagai think tank G20, mengusulkan agenda literasi digital untuk dibawa ke KTT 2017 di Jerman. Sementara KTT G20 pada tahun 2015 dan 2016 telah menaruh perhatian pada konsep kesenjangan digital dan cara-cara untuk melawannya dalam pembangunan, inklusi keuangan, dan perdagangan digital. Kelompok ini menekankan perlunya definisi yang konsisten, standar literasi digital di negara-negara G20 untuk alasan pengumpulan data, analisis, dan pengukuran. Pemahaman bersama tentang literasi digital akan dapat memanfaatkan potensi penuh dari berbagai investasi sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan, keberadaan program yang mampu mengedukasi populasi yang saat ini kurang beruntung dan belum terjangkau internet tentang manfaat teknologi digital akan mendukung pembuat kebijakan dalam hal mencapai tujuan transformasi digital.[vi]

Singkatnya, pada 2017, G20 harus mampu mengadopsi definisi literasi digital yang standar dan multidimensional, menghasilkan Indeks Literasi Digital, dan selaras dengan permintaan dan penawaran keterampilan digital yang dibutuhkan oleh semua stake holders. G20 Insight menyederhanakannya dalam tabel 1 di bawah ini.

Dimensi	Perspektif		
	Kognitif	Teknis	Etis
Informasi (Konten Digital)	Sintesis	Akses, Pengunaan	Penggunaan yang sesuai
Komputer (Perangkat Keras dan Lunak)	Evaluasi	Penggunaan	Penggunaan yang sesuai
Media (Tulisan, suara, gambar, video)	Kritik, Cipta	Navigasi	Penilaian kebenaran
Komunikasi (Interaksi Non-linier)	Kritik, Cipta	Pengembangan dan pengunaan konten	Penggunaan yang sesuai
Teknologi (Alat-alat untuk kehidupan sehari-hari)	Penemuan, evaluasi *tools* teknologi	Penggunaan	Penggunaan yang sesuai

Tabel 1. Versi Sederhana dari representasi Dimensi Perspektif Literasi Digital[vii]

Oleh karena itu, studi kasus ini dengan penuh pertimbangan memilih Australia, Kanada, Jepang, Italia, dan Meksiko, karena mereka mewakili beberapa negara G20 yang telah menerapkan kerangka kerja literasi digital melalui sektor formal (pemerintah) dan sektor informal (masyarakat). Kelima negara ini juga dipilih karena mewakili masing-masing benua, memiliki tingkat kecakapan ekonomi yang bervariasi, memiliki berbagai kebijakan, dan menunjukkan inisiatif awal dalam menerapkan kerangka kerja literasi digital. Diperlukan representasi geografis dan ekonomi untuk memastikan bahwa kasus yang disajikan dalam tulisan ini mencakup berbagai spektrum sehingga lebih banyak cerita, pelajaran, dan pengalaman dapat digambarkan. Di luar itu, G20 sendiri juga dapat dilihat sebagai kumpulan negara-negara yang memiliki tingkat literasi digital yang relatif cukup—seperti yang terlihat pada komunike mereka—yang mencerminkan kesadaran para pemimpin tentang perlunya pemanfaatan teknologi digital untuk mengakhiri kesenjangan digital. Mereka juga mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam memodernisasi dan peningkatan efisiensi dalam administrasi publik. Dalam pertemuan sebelumnya pada tahun 2016, gagasan tentang inklusi digital juga telah disetujui.[viii]

Negara	Sektor Formal	Sektor Informal
Argentina	ɧ	ɣ
Australia	ɨ	ʊ
Brazil	ʊ	ʊ
Kanada	ʜ	ʜ
Republik Rakyat Tiongkok	ɣ	ʊ
Perancis	ɦ	ɥ
Jerman	ɦ	ɧ
India	ɥ	ɧ
Indonesia	ʊ	ɥ
Italia	ɧ	ɧ
Jepang	ɨ	ɥ
Meksiko	ʜ	ɥ
Rusia	ɦ	ɥ
Arab Saudi	ʜ	ɥ
Afrika Selatan	ɧ	ɥ
Korea Selatan	ɦ	ʊ
Inggris	ɦ	ɥ
Amerika Serikat	ɧ	ɥ
Uni Eropa	ɦ	ʊ
Turki	ɦ	ʊ

Table 2. Inisiasi Literasi Digital Negara Anggota G20

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Center for Digital Society (CfDS) tentang pemetaan upaya Literasi Digital di antara anggota G20, terlihat bahwa beberapa negara memiliki lebih banyak inisiatif mengenai literasi digital di sektor formal dan informal dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menjadi landasan dalam memilih negara-negara yang akan diteliti dalam studi kasus ini, bersama dengan performa ekonomi mereka, seperti yang terlihat pada gambar di bawah.

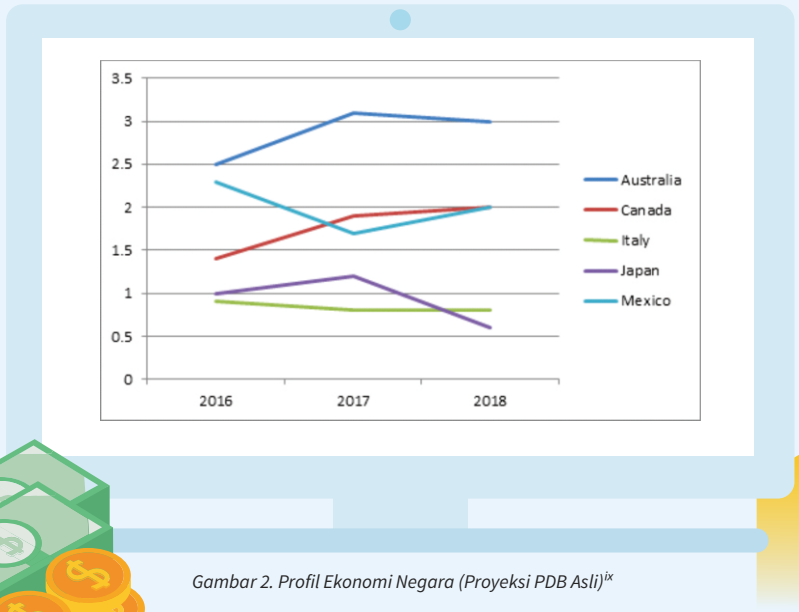

Gambar 2. Profil Ekonomi Negara (Proyeksi PDB Asli)[ix]

Seperti yang bisa kita lihat, negara-negara di atas menunjukkan performa ekonomi yang kontras satu sama lain. Menurut kategori yang disediakan oleh IMF, Jepang, Kanada, dan Australia dikategorikan sebagai ekonomi maju, sementara Meksiko dan Italia dikategorikan sebagai pasar dan ekonomi yang sedang berkembang. Perbedaan-perbedaan ini akan memberi kita kejelasan dalam melihat derajat implementasi dan upaya literasi digital secara objektif, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan negara-negara tersebut.

Studi Kasus: Australia

Australia adalah salah satu negara yang sangat baik dalam menerapkan kerangka literasi digital dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, bisnis, dan pembangunan. Dengan membentuk Kurikulum Australia tentang Teknologi Digital, Australia telah melihat kebutuhan untuk membantu dan memfasilitasi generasi muda lewat instrumen yang membantu mereka berkegiatan di dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.[x] Di samping itu, program ini diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan di bawah agenda Inovasi dan Sains Nasional. Program ini juga menargetkan para pendidik dan guru untuk mempelajari kembali dasar-dasar literasi digital. Pemerintah menyediakan pelatihan gratis dan kursus daring yang dapat diakses oleh pendidik terutama mereka yang mengajar di tingkat dasar untuk mengambil bagian dalam inisiatif digital ini. Murid-murid juga harus mengambil bagian dalam mengembangkan keterampilan hidup mereka yang meliputi literasi digital dan pengetahuan tentang teknologi berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dan penghargaan dalam bentuk kompetisi nasional dan Sekolah Musim Panas yang berfokus pada ilmu komputer.[xi]

Pemerintah Australia yakin bahwa transisi digital adalah bagian dari kemajuan dunia dan manfaat dari kemajuan teknologi. Meskipun demikian, sebagian besar program bertujuan untuk memberdayakan dan memperkaya orang-orangnya. Jadi, tidak ada program yang dibuat untuk membatasi akses informasi warga, terutama dari internet. Kebebasan pengguna tetap penting bagi pemerintah, dan itu menjadi tujuan mereka untuk mempersiapkan pengguna di masa depan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna yang lebih baik dengan pemahaman yang komprehensif tentang pertukaran informasi cepat tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan. Australia menafsirkan pentingnya menutup kesenjangan secara bertahap dengan menggunakan perangkat-perangkat digital. Selain itu, proyek inklusi digital secara nasional meningkatkan jumlah akses secara stabil selama empat tahun terakhir, dari 62,2 pada tahun 2014 menjadi 69,6 pada 2017. Australia lebih sering mengakses internet, menggunakan berbagai macam teknologi, dan dengan rencana data yang lebih besar dari hari ke hari.[xii]

Program berbasis literasi digital lainnya di Australia dikembangkan oleh masyarakatnya. *Go Digi* adalah salah satu contoh baik tentang bagaimana masyarakat telah memahami peran teknologi yang tak terelakkan dan bagaimana mereka ingin orang-orang yang tidak terbiasa dengan cara kerja sistem digital. Keterlibatan yang disediakan oleh organisasi dibagi menjadi tiga; pembelajar, mentor, dan mitra. Peserta didik bebas mengambil materi pelajaran tentang cara melakukan berbagai hal secara daring, mulai dari belanja elektronik, hingga cara mendapatkan akses yang tepat untuk jenis informasi yang tepat. Mentor adalah mereka yang sudah memiliki keterampilan literasi digital dan mau mengajarkan kemampuan mereka kepada para pembelajar. Terakhir, mitra adalah organisasi/institusi yang bersedia berkolaborasi dengan Go Digi dalam melakukan pelatihan / acara yang terkait dengan literasi digital.

Studi Kasus: Kanada

Di Kanada, internet dapat diandalkan dan biayanya terjangkau bagi setiap orang. Dengan sumber daya manusia yang cukup, Kanada berharap untuk secara bertahap bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi digital dunia. Namun, seorang kritikus Tea Hadziristic menunjukkan bahwa Kanada memiliki kekurangan dalam hal literasi digital karena tidak adanya definisi literasi digital dan mekanisme pengukurannya.[xiv] Tidak adanya strategi nasional yang komprehensif membuat pengembangan literasi digital di Kanada menjadi terbatas dan tidak terukur. Terlepas dari keterbatasan di atas, tidak berarti bahwa pemerintah dan masyarakat sipil tidak berbuat apa-apa tentang literasi digital. Ada beberapa inisiatif, kebijakan, dan kampanye yang dikembangkan untuk mempromosikan literasi digital dalam setiap aspek, mulai dari pendidikan, bisnis, dan juga masyarakat itu sendiri.

Proyek awal yang memperkenalkan internet kepada masyarakat telah dipupuk dengan "Program Akses Masyarakat" oleh pemerintah pada akhir 1990-an. Sebagai hasil dari inisiasi ini, 84% populasi di Kanada saat ini adalah pengguna internet aktif. Kemudian, upaya untuk meningkatkan literasi digital di Kanada berlanjut pada tahun 2001 melalui penerapan "Strategi Kanada untuk Mempromosikan Penggunaan Internet yang Aman, Bijak, dan Bertanggung Jawab." Tujuan utama dari instrumen ini adalah untuk mendidik dan memberdayakan pengguna internet dan meningkatkan legitimasi pemerintah di dunia maya.[xv] Selanjutnya, Kanada memperingati 150 tahun

kemerdekaannya di tahun 2017 dengan pengenalan "Digital Canada 150." Digital Canada 150 terdiri dari lima pilar, termasuk perlindungan untuk pengguna internet Kanada dan juga promosi konten bernuansa Kanada.[xvi] Saat ini, model baru dari tindakan anti-cyberbullying sedang berlangsung setelah hukum yang sama ditolak oleh Mahkamah Agung Kanada pada tahun 2015.[xvii]

Karena ukuran teritori yang sangat besar dan populasi yang relatif kecil, pendidikan jarak jauh cukup populer di seluruh negeri. Pembelajaran daring K-12 di Kanada adalah program yang memanfaatkan TIK sebagai media pendidikan yang menarik lebih dari 245.000 murid pada tahun 2011 saja.[xviii] Melihat tren ini, dapat dianalisis bahwa penggunaan TIK sebagai media utama pendidikan juga dapat berkontribusi positif terhadap literasi digital di kalangan pemuda Kanada. Namun, seperti yang disebutkan oleh Hadziristik, pemerintah membutuhkan kerja ekstra untuk membangun kurikulum literasi digital nasional yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan luring dan daring Kanada.[xix]

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak adanya patokan nasional pada literasi digital membuat peran masyarakat sipil dalam topik ini menjadi semakin penting. Untungnya, beberapa organisasi sipil memimpin jalan dengan mengembangkan program literasi digital. Misalnya, "ABC Internet Matters", sebuah program yang dikembangkan oleh ABC Life Literacy, bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dengan mengadakan lokakarya di beberapa kota serta memproduksi karya literatur.[xx] Sementara itu, Neil Squire Society sedang bekerja untuk meningkatkan literasi digital di kalangan penduduk usia lanjut di Kanada melalui program *Seniors-on-Seniors Technology*.[xxi] Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa keaktifan organisasi sipil telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat di Kanada. Selanjutnya, jika pemerintah ingin sekali mendukung organisasi sipil secara konsisten, mungkin pemerintah dapat mengambil peran kepemimpinan yang lebih banyak dalam membangun literasi digital di Kanada.

Studi Kasus: Italia

Italia memiliki tingkat perkembangan internet dan literasi digital yang rata-rata dibandingkan dengan empat negara lain dalam studi kasus ini. Penelitian oleh Davide Gualerzi menemukan bahwa Italia masih memiliki kesenjangan digital yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi di setiap wilayah.[xxii] Meskipun demikian, pemerintah kini membuat komitmen serius untuk mengintegrasikan TIK ke dalam program pembangunan nasional mereka.

Upaya membangun literasi digital harus disertai dengan infrastruktur internet yang memadai juga. Italia mengalami kendala pada titik ini setelah berlakunya UU No. 155/2005 atau dikenal sebagai Hukum Pisanu. Pasal 7 undang-undang ini menyatakan bahwa mereka yang ingin membangun koneksi Wi-Fi publik perlu menginformasikan tujuan mereka kepada polisi sebelumnya.[xxiii] Artikel ini dibuat karena kekhawatiran terhadap pemanfaatan Wi-Fi publik oleh teroris untuk koordinasi aksi mereka. Akhirnya, artikel khusus ini dihapus pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2012, Menteri Pembangunan Ekonomi, dan beberapa menteri lainnya mengeluarkan keputusan yang menghasilkan pembentukan “Agenda Digital Italia.” Kebijakan ini bertujuan untuk mengadopsi strategi dan prinsip agenda digital sebagaimana ditetapkan oleh Uni Eropa ke dalam konteks Italia.[xxiv] Sejak itu, pemerintah juga membentuk Badan Digital Italia, sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga pengembangan TIK dan inovasi di setiap sektor, termasuk pendidikan, administrasi digital, dan juga keterbukaan data publik.[xxv]

Pemerintah Italia memperkenalkan "Nati per Leggere" (program literasi keluarga) sebagai upaya mereka untuk memberdayakan keluarga, sebagai institusi sosial terkecil, untuk menjadi aktor aktif yang menciptakan lingkungan terpelajar.[xxvi] Diharapkan dengan pemberdayaan di tingkat keluarga, Italia mampu memelihara kesadaran literasi digital sedini mungkin. Kemudian, untuk melengkapi kebijakan di tingkat keluarga, Italia menempatkan upaya progresif dalam mengintegrasikan pendidikan mereka dengan kemajuan TIK.

Pemerintah telah mempertimbangkan gagasan penerapan TIK dalam pendidikan sejak 1985, dan pada 2007, Italia memperkenalkan "Piano Nazionale Scuola Digitale" (sekolah digital) sebagai rencana nasional baru yang bertujuan menjadikan internet sebagai komponen standar di setiap kelas sekolah.[xxvii] Kebijakan ini memiliki dua

tujuan utama, yaitu: untuk meningkatkan keterampilan TIK masyarakat dan juga untuk mereformasi metode pembelajaran di sekolah.[xxviii] Di tingkat lokal, ada juga program seperti "Laboratori", "Lesamol", dan juga " Using Web Comic in Education". Program-program tersebut menawarkan agenda seperti proses belajar, membaca, dan lokakarya, yang memanfaatkan internet sebagai platform utama di seluruh kegiatan.[xxix] Oleh karena itu, dapat disimpulkan di sini bahwa pemerintah Italia sedang berupaya ekstra untuk mengajarkan literasi digital dari lingkungan terkecil dengan harapan bahwa rangkaian program ini dapat memberikan hasil yang komprehensif untuk generasi masa depan Italia.

Studi Kasus: Jepang

Saat ini, Jepang masih diakui sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akami Technologies, Jepang memiliki koneksi internet tercepat ketujuh (7) di dunia.[xxx] Selain itu, Jepang memiliki pengguna internet paling aktif keenam pada Maret 2017 dengan hampir 93% penduduknya mampu mengakses internet. Kemudian, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan koneksi internet yang canggih, pemerintah Jepang dan masyarakat sipil melangsungkan beberapa kampanye untuk memastikan bahwa ketersediaan koneksi internet digunakan untuk tujuan positif.

Pertama-tama, rencana untuk mengembangkan TIK—termasuk internet—di Jepang telah diperkenalkan e-Japan sejak tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2004, e-Japan direformasi dan diganti namanya menjadi u-Japan dengan empat prinsip; *Ubiquitous, Universal, User-Oriented,* dan *Unique*. Melalui U-Japan, pemerintah berharap untuk "mewujudkan masyarakat yang kuat, aman, dan nyaman melalui penggunaan TIK."[xxxi] Selain itu, U-Japan juga ditargetkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Jepang pada tahun 2010.

Fumie Kumagai, dalam jurnalnya, menyimpulkan bahwa rencana pengembangan internet harus ditujukan untuk memberi pemuda 'lingkungan media berbasis teknologi' dengan harapan bahwa generasi berikutnya di Jepang dapat menggunakannya untuk tujuan pembelajaran dalam banyak aspek.[xxxii] Belum ada peraturan nasional yang membahas sensor konten di Jepang karena konstitusi Jepang menghormati kebebasan berbicara. Meskipun demikian, masyarakat sipil dan industri

sama-sama aktif dalam agenda pembatasan konten internet. Pada tahun 2008, sebuah organisasi sipil yang disebut sebagai Asosiasi Evaluasi dan Pemantauan Konten dibentuk. Tugas utamanya adalah untuk mengadvokasi penggunaan telepon seluler yang sehat di kalangan masyarakat.[xxxiii] Kemudian pada tahun 2011, Asosiasi Keamanan Konten Internet—sebuah organisasi dengan tujuan yang sama—didirikan dan kemudian 21 anggota penyedia internet bergabung ke dalamnya.

Tentu saja, dari antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan strategi nasional yang komprehensif, upaya untuk meningkatkan literasi digital di Jepang juga dilakukan melalui beberapa kampanye non-formal. Misalnya, pemerintah Jepang mendorong penggunaan media sosial dalam pemilihan majelis tinggi tahun 2013 meskipun di masa lalu praktik ini dilarang karena undang-undang pemilu yang kaku.[xxxiv] Profesor Takeshi Natsuno menyebut larangan media sosial adalah alasan di balik terbelakangnya politik Jepang.[xxxv] Dengan demikian, dapat dilihat bahwa diizinkannya penggunaan media sosial merupakan langkah besar bagi Jepang untuk memodernisasi ekosistem pemilihannya dan juga meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah dan sektor swasta di Jepang saat ini sedang mengusulkan ide "Kamp Jepang Puasa Internet". Program ini ditujukan untuk anak sekolah yang kecanduan internet. Meskipun internet adalah teknologi yang menguntungkan, internet juga disalahkan sebagai sumber obesitas dan gangguan makan di antara anak-anak di Jepang. Program ini akan mengajarkan siswa bagaimana cara menggunakan internet dengan seefektif mungkin tanpa harus kecanduan.

Studi Kasus: Meksiko

Meksiko adalah salah satu negara yang saat ini memperjuangkan internet sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Secara hukum, Pasal 6 Konstitusi Meksiko mengakui tugas negara untuk menjamin akses terhadap TIK, termasuk internet. Perpanjangan dari pasal yang sama menetapkan bahwa telekomunikasi adalah layanan publik untuk kepentingan umum, dan harus disediakan dengan kondisi yang baik bagi persaingan, kualitas, pluralitas, cakupan universal, interkoneksi, konvergensi, kontinuitas, akses bebas, dan tanpa gangguan.[xxxvi] Dalam menghadapi masalah-masalah seperti ketidaksetaraan ekonomi, pemerintah Meksiko melihat bagaimana internet dapat membuka peluang secara inklusif kepada semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, selain dari kemajuan mereka dalam menjadikan internet sebagai hak asasi manusia, yang dapat dinikmati oleh orang-orang Meksiko, negara juga sangat menghargai kebijakan kebebasan berinternet (*net neutrality*) mereka, yang mendukung prinsip-prinsip non-diskriminasi dan akses bebas.[xxxvii]

Jalan Meksiko menuju pemerintah yang lebih terdigitalisasi didorong oleh agenda Strategi Digital Nasional mereka yang dimulai pada 2013; "Digital Mexico" yang baru hadir dengan berbagai strategi, instrumen, dan pendekatan yang menjadi kerangka kerja bagi pembangunan negara. Strategi Digital Nasional, yang dikoordinasikan oleh Kantor Presiden dapat dilihat sebagai upaya mendemokratisasikan akses ke teknologi seperti internet dan *broadband* dan pemanfaatan teknologi sebaik-baiknya tanpa batas. Beberapa contoh langkah yang dilakukan untuk memenuhi rencana lima tahunan Meksiko adalah inklusi digital yang terdiri dari transformasi pemerintah, ekonomi digital, pendidikan berkualitas, jaminan sosial, dan keselamatan publik dalam menggunakan teknologi digital.[xxxviii] Selain reformasi internal, pemerintah Meksiko juga meluncurkan kampanye melawan *cyberbullying*, karena kasus-kasus perundungan yang parah di Meksiko menjadi perhatian nasional. Dalam kampanye tagar #ElBullyingNOEsUnJuego atau "Bullying BUKAN permainan," presiden, selebritas, dan tokoh terkenal lainnya ambil bagian dalam kampanye nasional ini untuk menjadikan sekolah dan platform digital sebagai ruang yang aman bagi para siswa.[xxxix]

Upaya pemenuhan agenda tidak berakhir pada tingkat pemerintahan; banyak tindakan berbasis masyarakat juga dilakukan oleh warga Meksiko. Salah satu yang secara khusus menyuarakan pentingnya literasi digital dan aman di internet adalah Think Before You Sext: 10 Alasan Tidak Melakukan *Sexting*.[xl] Inisiatif ini menekankan pentingnya perlindungan privasi seseorang, dan isu bahaya kebocoran informasi di internet. Kerangka kerja yang dibuat organisasi ini membantu pengguna internet memahami masalah privasi di internet dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Perbandingan

Dengan melihat berbagai kasus dan implementasi, ada beberapa perbedaan dan persamaan dalam konteks kerangka literasi digital. Pertama, setiap negara memiliki interpretasi mereka tentang apa itu literasi digital dan bagaimana mereka melihatnya cocok untuk masalah di dalam negeri. Namun, ada satu kesamaan yang signifikan di antara semuanya, yaitu kebutuhan akan solusi reaktif terhadap dunia yang terus berubah. Dalam konteks ini, kebutuhan itu adalah kemajuan teknologi. Sementara negara-negara seperti Meksiko fokus pada literasi digital sebagai solusi jangka panjang untuk mewujudkan "Digital Mexico," negara-negara seperti Australia melihat literasi digital sebagai paket lengkap yang dipasangkan dengan agenda pembangunan inklusifnya.

Namun, di antara negara-negara ini, ada kesamaan dalam hal pengembangan kampanye sebagai cara untuk menumbuhkan literasi digital sesuai dengan budaya, nilai, dan lingkungan sosial-politik masing-masing. Kesamaan lain adalah peran masyarakat sipil di Jepang, Italia, dan Kanada, yang mengambil inisiatif aktif untuk mendorong peningkatan literasi digital. Komunitas di Kanada, misalnya, diberdayakan oleh pemerintah untuk menyentuh tingkat akar rumput. Sementara itu, di Meksiko, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat terkemuka terlibat dalam

kampanye nasional untuk melawan *cyberbullying*. Kemiripan lain yang tampak jelas adalah upaya masing-masing negara untuk mempersiapkan generasi muda dengan literasi digital yang cukup. Misalnya, setiap sekolah Italia harus dilengkapi dengan TIK untuk membantu aktivitas siswa.

Di sisi lain, studi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua negara memiliki rencana nasional yang komprehensif. Jepang adalah satu-satunya negara yang mengusulkan rencana nasional buatan sendiri sementara Italia hanya mengadopsi kerangka kerja Uni Eropa yang lebih besar. Selain itu, Kanada masih berjuang dengan peraturan tingkat nasional mereka, dan sebagai hasilnya, mereka belum memiliki rencana nasional tentang pengembangan TIK dan saat ini masih bergantung pada peran masyarakat sipil atau inisiatif pemerintah skala kecil.

Dari kasus-kasus di atas, dapat dipelajari bahwa literasi digital ditingkatkan bukan melalui pelarangan konten, tetapi melalui pemberdayaan dan pendidikan. Negara-negara seperti Kanada, Meksiko dan Jepang, yang sangat menghormati hak asasi manusia dalam konstitusi mereka, mencoba untuk mendidik penduduk mereka tentang bagaimana menggunakan internet secara efisien dan positif daripada membatasi hak dan kebebasan berbicara mereka. Selanjutnya, program untuk meningkatkan literasi digital juga harus dimulai sedini mungkin untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan terkemuka di era digital. Australia, Kanada, dan Italia berupaya keras untuk mendidik anak-anak usia sekolah dengan pengetahuan digital yang memadai dalam kurikulum nasional mereka, sementara Jepang dan Meksiko sedang mengembangkan beberapa program untuk pemuda di daerah mereka masing-masing.

Kesimpulan

Literasi digital adalah keterampilan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kerangka yang diberikannya jauh lebih rumit daripada panduan di Internet dan aturan operasional yang dapat membantu orang untuk berselancar di dunia digital. Dalam dunia yang sangat terhubung, literasi digital menjadi seperangkat keterampilan yang mampu memberdayakan masyarakat sebagai manusia dan pekerja yang lebih baik. Dengan literasi digital, orang akan dapat memilah dan memilih hal baik dari sekian banyak informasi gratis dan jenis konten yang tersedia di internet yang banyak di antaranya mengandung hal-hal yang membahayakan pribadi atau masyarakat. Dunia digital, khususnya Internet, hanyalah sebuah ruang yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi bertahun-tahun.

Untuk sementara waktu, internet memang bebas dari aturan dan peraturan, tetapi internet kemudian juga dimasuki oleh berbagai konten misinformasi, indoktrinasi kekerasan, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Alih-alih memenuhi perannya sebagai pembangkit kehidupan sosial-ekonomi di dunia maya, tanpa keterampilan dan perhatian yang tepat dari pemerintah, masyarakat tidak akan dapat mencapai potensi penuh mereka. Melalui studi-studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana masing-masing negara dan warganya mengalokasikan sejumlah perhatian pada gagasan literasi digital—meskipun bentuk-bentuknya tidak sama.

Apa yang bisa kita pelajari di sini — terutama untuk Indonesia — adalah bahwa beberapa negara telah berusaha membuat internet menjadi ruang yang lebih baik bagi masyarakat dan bagaimana keterlibatan pemerintah pada tingkat tertentu diperlukan dengan menciptakan kerangka kerja bersama serta menciptakan kesadaran. Indonesia belum membiasakan diri dengan istilah literasi digital. Meskipun sebagian besar kebijakan terkait internet di Indonesia lebih terkait dengan pengawasan, dengan meneladani contoh-contoh kebijakan dan rencana nasional dari negara lain, Indonesia harus mampu menerapkan solusi jangka panjang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga lebih banyak pengguna

internet di Indonesia yang memiliki tingkat literasi digital yang baik. Selain itu, Indonesia juga harus melihat potensi internet dalam hal persebaran informasi dan potensi sarana belajar. Dengan memanfaatkan transisi menuju era internet, upaya-upaya yang harus diterapkan Indonesia di masa depan harus dapat menyatukan pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjadikan internet sebagai ruang inklusif bagi semua orang dan menggunakannya untuk pemberdayaan masyarakat.

Referensi

[i]Cisco (2016). *Cisco Visual Networking Index Complete Traffic Forecast (2016–2021)*. [daring] Cisco. Tersedia di: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/qa_c67-482177.html [Diakses pada 18 Agu. 2017].

[ii]Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital Era. *Jl. of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1), hal.93-106.

[iii]Iinuma, M. (2016). *Learning and teaching with technology in the knowledge society: New Literacy, Collaboration, and Digital Content*. 1st ed. Tokyo: Springer, pp.8-10.

[iv]UNESCO (2011). *Policy Brief: Digital Literacy in Education*. Paris: UNESCO Institute for Information Technologies and Education, hal.2-3

[v]Boskova, I. (2016). *Why We Must Stop Radicalization*. [daring] Huffington Post. Tersedia di: http://www.huffingtonpost.com/irina-bokova/stop-radicalization_b_8590060.html [Diakses pada 20 Jul. 2017].

[vi]Chetty, K., Gcora, N., Josie, J., Li, W., Liu, Q. and Zhenglin, B. (2017). *Bridging the Digital Divide: Measuring Digital Literacy - Policy Brief*. 1st ed. Hamburg: G20 Insight.

[vii]Ibid.

[viii]G20 (2016). *G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative*. Joint Statement. Beijing: G20.

[ix]International Monetary Fund (2017). *World Economic Outlook*. World Economic and Financial Surveys. Washington, DC: International Monetary Fund.

[x]Australian Government Department of Education and Training (2017). *Digital Technologies*. [daring] Australiancurriculum.edu.au. Tersedia di: https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/technologies/digital-technologies/ [Diakses 19 Agu. 2017].

[xi]Australian Government Department of Education and Training (2016). *Inspiring all Australians in digital literacy and STEM | Department of Education and Training*. [daring] Education.gov.au. Tersedia di: https://www.education.gov.au/inspiring-all-australians-digital-literacy-and-stem [Diakses pada 20 Jul. 2017].

[xii]Thomas, J., Baracket, J., Wilson, C., Ewing, S., Mackdonald, T., Tucker, J. and Rennie, E. (2017). *Measuring Australia's Digital Divide: The Australian Digital Inclusion Index 2017*. Australian Digital Inclusion. Melbourne: Roy Morgan Research., hal.7-9.

[xiii]Go Digi Australia. (n.d.). *Go Digi Australia*. [daring] Tersedia di: https://www.godigi.org.au/ [Diakses 21 Agu. 2017].

[xiv]Hadziristic, T. (2017). The State of Digital Literacy in Kanada, Brookfield Institute Working Paper April 2017, hal. 12

[xv]Media Awareness Network. (2010) *Digital Literacy in Canada: From Inclusion to Transformation*. Tersedia di: http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/digitalliteracypaper.pdf. hal.21.

[xvi]Government of Kanada. (2015) *Digital Canada 150 2.0*. Tersedia di: http://de-en.gc.ca/eic/site/028.nsf/eng/home#item7. [Diakses pada 22 Agu 2017]

[xvii]Rhodes, B. (2016) *New Nova Scotia Anti Cyber-Bullying Law Won't Come Before Next Spring*, CBNews, 22 September. Tersedia di: http://www.cbc.ca/news/Kanada/nova-scotia/diana-whalen-cyber-safety-act-cyberbullying-law-bill-legislation-1.3774281. [Diakses pada 22 Agu. 2017].

[xviii]Barbour, MK. (2012) *State of the Nation: K-12 Online Learning in Canada*, Open School BC, Kanada.

[xix]Hadziristic, T (2017), p. 29.

[xx]ABC Life Literacy (n.d.) *Digital Literacy*. Tersedia di: http://abclifeliteracy.ca/digital-literacy. [Diakses pada 22 Agu. 2017]

[xxi]Neil Squire Society (n.d.) *Seniors on Seniors Technology*. Tersedia di: http://www.neilsquire.ca/research-development/projects-activities/seniors-on-seniors-technology/. [Diakses pada 22 Agu. 2017].

[xxii]Gualerzi, D. (2016) 'Access to the Internet and Regional Structures: The Case of Italy', *Economia & Region*, vol. 10, no. 1,

hal. 61-64.

[xxiii]About the Law n. 155, 31st July 2005, known as "Pisanu Law" n.d., *Inventati*. Tersedia di: https://www.inventati.org/reati_associativi/traduzioni/eng_02.html. [Diakses pada 22 Agu. 2017].

[xxiv]Italian Digital Agenda n.d., *Science and Technology Digital Library*. Tersedia di: http://stdl.cnr.it/en/the-project/the-european-and-national-scenario/italian-digital-agenda. [Diakses pada 22 Agu. 2017].

[xxv]Ibid

[xxvi]Ibid, p. 9

[xxvii]Avvisati, F, Hennessy, S, Kozma RB & Vincent-Lancrin, S. (2013) Review of The Italian Strategy for Digital Schools, OECD Education Working Paper Series. Tersedia di: https://www.oecd.org/edu/ceri/Innovation%20Strategy%20Working%20Paper%2090.pdf. [Diakses pada 22 Agu. 2017]

[xxviii]ibid

[xxix]European Literacy Policy Network (ELINET) 2016, Literacy in Italy Country Report Short Version, Lifelong Learning Programme. Tersedia di: http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Italy_Short_Report1.pdf. [Diakses pada 22 Agu. 2017]

[xxx]Garfield, L . (2016) *The Top 10 Countries with the Fastest Internet*, Business Insiders, 15 July. Tersedia di: http://www.businessinsider.com/the-countries-with-the-fastest-internet-speed-2016-7/?IR=T/#10-finland-1. [Diakses pada 22 Agu. 2017].

[xxxi]Turner, J. (2005) The Transition to a Ubiquitous Internet Society, *J@pan Inc Magazine*, Autumn 05, hal. 21-22.

[xxxii]Kumagai, F. (2001) 'Possibilities for Using the Internet in Japanese Education in the Information Age Society', *International Journal of Japanese Sociology*, vol. 10, p. 41.

[xxxiii]Matsuda, M. (2010, 'Japanese Mobile Youth in the 2000s', in Donald, SH, Anderson, TD & Spry, D (eds.), *Youth Society and Mobile Media in* Asia, hal. 40, Routledge, UK.

[xxxiv]Xue, D. (2014), 'Online Media Use During 2013 Japanese Upper –House Election: A Content Analysis of Comments on Candidates' Facebook Pages', *Keio Communication Review*, no. 36, hal. 53.

[xxxv]Mie, A. (2013), *Election Campaigning Takes to Net*, The Japan Times, 11 April, Tersedia di: https://www.japantimes.co.jp/news/2013/04/11/national/politics-diplomacy/election-campaigning-takes-to-net/#.WZxZbD6g_6Q. [Diakses pada 22 Agu. 2017].

[xxxvi]Estados Unidos Mexicanos (n.d.). *Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2007*. Mexico: Estados Unidos Mexicanos, p.103.

[xxxvii]García, L. and Chorny, V. (2016). *Country report: Mexico*. Examining Internet Freedom in Latin America. Open Society Institute, pp.3-4.

[xxxviii]Gobierno de la República (2013). *National Digital Strategy*. Mexico City: Gobierno de la República, hal.11-13.

[xxxix]Tuttle, S. (2014). *Child's death sparks nationwide anti-bullying campaign in Mexico*. [daring] Digitaljournal.com. Tersedia di: http://www.digitaljournal.com/news/world/child-s-death-sparks-nationwide-anti-bullying-campaign-in-mexico/article/387412 [Diakses pada 21 Agu. 2017].

[xl]Fernandez de Castro, R. (2016). *Mexico launches a nationwide campaign against sexting*. [daring] Splinternews.com. Tersedia di: http://splinternews.com/mexico-launches-a-nationwide-campaign-against-sexting-1793861049 [Diakses pada 21 Agu. 2017].

Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Room BC 201-202, BC Building 2nd Floor,
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone : (0274) 563362, Ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Website : cfds.fisipol.ugm.ac.id

facebook.com/cfdsugm
cfds.fisipol.ugm.ac.id
cfds_ugm
@cfds_ugm
@cfds_ugm
CfDS UGM